



Perkembangan Gerakan Sosial Rakyat Indonesia dalam Melawan Kolonialisme Belanda Abad XIX–XX

The Development of the Indonesian People's Social Movement in Fighting Dutch Colonialism in the 19th–20th Centuries

Zuriatin^{1*}, Rosdiana², Syahbuddin³

Prodi Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima

Email: atinamin57@gmail.com^{1*}, rosediana8885@gmail.com², oribedo70@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received : 18-07-2026

Revised : 20-07-2026

Accepted : 22-07-2026

Published : 24-07-2026

Abstract

his study aims to analyze the development of Indonesian people's social movements against Dutch colonialism during the nineteenth and twentieth centuries and to explain the transformation of resistance from localized armed struggles to modern national movements. The research employed a historical method with a descriptive qualitative approach, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through library research using archival documents, historical records, scholarly books, and scientific journal articles related to Dutch colonialism and the Indonesian national movement. The findings reveal that the development of Indonesian social movements occurred in three major phases. The first phase, traditional resistance (1800–1900), was characterized by localized armed struggles, including the Padri War, Java War (Diponegoro War), Banjar War, and Aceh War, as responses to colonial political intervention and economic exploitation. The second phase, the transition period (1901–1911), was marked by the implementation of the Ethical Policy, which promoted modern education, gave rise to indigenous intellectuals, and fostered political awareness through education and the press. The third phase, the modern national movement (1908–1942), was characterized by the emergence of modern organizations, the expansion of the national press, broader public participation, and the growth of Indonesian nationalism. The study concludes that Indonesian social movements evolved from localized resistance into organized national movements, laying the foundation for the development of national identity and the struggle for Indonesian independence.

Keywords: *social movements, Dutch colonialism, nationalism*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda pada abad XIX–XX serta menjelaskan transformasi bentuk perjuangan dari perlawanan lokal menuju gerakan nasional modern. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari arsip, dokumen sejarah, buku, dan artikel ilmiah yang relevan mengenai kolonialisme Belanda dan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia berlangsung dalam tiga fase utama. Fase pertama adalah perlawanan tradisional (1800–1900) yang ditandai oleh perlawanan bersenjata bersifat lokal, seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Banjar, dan Perang Aceh, sebagai respons terhadap eksploitasi ekonomi dan intervensi politik kolonial. Fase kedua adalah fase transisi (1901–1911) yang dipengaruhi oleh penerapan Politik Etis sehingga melahirkan kelompok intelektual pribumi dan meningkatkan kesadaran politik melalui pendidikan dan pers. Fase ketiga adalah gerakan nasional modern (1908–1942) yang ditandai oleh lahirnya organisasi modern, berkembangnya pers nasional, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa



gerakan sosial rakyat Indonesia mengalami transformasi dari perjuangan yang bersifat lokal menuju gerakan nasional yang terorganisasi, sehingga menjadi fondasi penting bagi terbentuknya identitas nasional dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: gerakan sosial, kolonialisme Belanda, nasionalisme.

PENDAHULUAN

Kolonialisme Belanda merupakan salah satu periode terpenting dalam sejarah Indonesia karena membentuk dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Nusantara. Selama abad XIX hingga awal abad XX, pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi. Penerapan sistem Cultuurstelsel (Tanam Paksa) sejak tahun 1830, misalnya, menyebabkan penderitaan ekonomi yang luas akibat tingginya beban produksi, pajak, dan kerja paksa yang harus ditanggung oleh masyarakat pedesaan. Kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat dominasi kolonial, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk resistensi rakyat di berbagai daerah. (Rosmaida et al. 2025)

Menurut (Ricklefs 2008) (Rosmaida et al. 2025), kolonialisme Belanda pada abad ke-19 menciptakan perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia melalui penetrasi ekonomi kolonial, birokrasi modern, dan integrasi wilayah ke dalam sistem kapitalisme dunia. Perubahan tersebut di satu sisi memperkuat kekuasaan kolonial, tetapi di sisi lain melahirkan berbagai bentuk ketidakpuasan yang kemudian berkembang menjadi gerakan-gerakan sosial rakyat.

Pada fase awal, gerakan sosial rakyat Indonesia masih berbentuk perlawanan lokal yang dipimpin oleh raja, bangsawan, ulama, maupun tokoh masyarakat. Perlawanan seperti Perang Diponegoro (1825–1830), Perang Padri (1803–1838), Perang Banjar (1859–1863), dan Perang Aceh (1873–1904) merupakan respons terhadap campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan politik, ekonomi, dan kehidupan keagamaan masyarakat. Namun demikian, gerakan-gerakan tersebut masih bersifat kedaerahan, belum memiliki koordinasi antardaerah, serta belum dilandasi oleh kesadaran nasional sebagai satu bangsa. (Jahan 2024)

Memasuki awal abad XX, perkembangan gerakan sosial rakyat mengalami transformasi yang cukup mendasar. Kebijakan Politik Etis (Ethical Policy) yang mulai diterapkan pada tahun 1901 membuka akses pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi. Meskipun pada awalnya kebijakan tersebut bertujuan mendukung kepentingan administrasi kolonial, pendidikan modern justru melahirkan kelompok intelektual pribumi yang memiliki kesadaran politik dan nasionalisme yang semakin kuat. Dari kelompok inilah kemudian lahir organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Muhammadiyah (1912), hingga Partai Nasional Indonesia (1927) yang mengubah pola perjuangan dari perlawanan fisik menjadi perjuangan melalui organisasi, pendidikan, pers, dan aktivitas politik. (Rosmaida et al. 2025)

Dalam perspektif gerakan sosial, perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi bentuk perlawanan dari gerakan tradisional menuju gerakan modern yang lebih terorganisasi. Kartodirdjo (1990) menjelaskan bahwa gerakan sosial pada masa kolonial merupakan bentuk respons kolektif masyarakat terhadap ketidakadilan struktural yang diciptakan oleh sistem kolonial. Gerakan tersebut berkembang seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat, munculnya elite intelektual, berkembangnya media massa, serta meluasnya jaringan komunikasi antardaerah.



Dengan demikian, gerakan sosial tidak hanya dipahami sebagai perlawanan terhadap penjajah, tetapi juga sebagai proses pembentukan identitas nasional Indonesia. (Kartodirdjo 1990)

Shiraishi (1997) menegaskan bahwa periode 1912–1926 merupakan fase penting yang disebut sebagai *Zaman Bergerak*, yaitu masa ketika rakyat mulai terlibat aktif dalam organisasi politik, serikat buruh, perkumpulan pemuda, dan berbagai gerakan sosial yang bersifat massal. Pada periode ini, kesadaran kolektif rakyat berkembang melalui pendidikan, pers, diskusi politik, serta aktivitas organisasi yang memperkuat solidaritas nasional. Gerakan sosial tidak lagi terbatas pada elit tradisional, tetapi telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat seperti pedagang, buruh, petani, kaum terdidik, dan perempuan. (Jahan 2024)

Kajian mengenai perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda masih memiliki relevansi yang tinggi dalam historiografi Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji perlawanan daerah atau organisasi nasional secara terpisah, sementara kajian yang menghubungkan transformasi gerakan sosial dari abad XIX menuju abad XX masih relatif terbatas. Padahal, perubahan pola perjuangan tersebut menjadi dasar terbentuknya nasionalisme Indonesia yang akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. (Muzakir 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda pada abad XIX–XX, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong transformasi gerakan sosial dari perlawanan tradisional menuju gerakan nasional modern, serta menjelaskan kontribusi gerakan sosial terhadap lahirnya nasionalisme Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah sosial Indonesia, khususnya mengenai dinamika gerakan rakyat sebagai fondasi perjuangan kemerdekaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historical research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode sejarah dipilih karena penelitian ini bertujuan merekonstruksi perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda pada abad XIX–XX berdasarkan fakta-fakta historis yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kuntowijoyo metode sejarah merupakan serangkaian prosedur ilmiah yang digunakan untuk menemukan, menguji, menganalisis, dan menyajikan fakta-fakta sejarah secara sistematis sehingga menghasilkan rekonstruksi sejarah yang objektif. (Arifin 2023)

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi arsip pemerintah kolonial, *Staatsblad*, laporan resmi pemerintah Hindia Belanda, surat kabar sezaman, dokumen organisasi pergerakan nasional, serta naskah pidato tokoh-tokoh pergerakan. Adapun sumber sekunder berupa buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kolonialisme Belanda, gerakan sosial, nasionalisme, dan sejarah pergerakan Indonesia. Penggunaan berbagai jenis sumber bertujuan memperoleh data yang komprehensif sekaligus memungkinkan dilakukannya proses triangulasi informasi.



Penelitian ini mengikuti tahapan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk 1986)(Kuntowijoyo 2013)(Amsi 2026). Tahapan tersebut merupakan prosedur baku dalam penelitian sejarah untuk menghasilkan rekonstruksi sejarah yang valid dan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase Perlawanan Tradisional (1800–1900): Perlawanan Bersenjata Bersifat Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fase awal perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia pada abad XIX ditandai oleh perlawanan bersenjata yang bersifat lokal, tradisional, dan belum terorganisasi secara nasional. Gerakan-gerakan tersebut muncul sebagai bentuk resistensi terhadap kebijakan kolonial Belanda yang semakin memperluas kekuasaan politik dan eksploitasi ekonomi di berbagai wilayah Nusantara. Pada periode ini, masyarakat belum memiliki kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia, sehingga setiap perlawanan lebih berorientasi pada pembelaan terhadap kepentingan kerajaan, wilayah, adat istiadat, dan agama masing-masing. Dengan demikian, karakter utama gerakan sosial pada fase ini adalah lokalisme, yaitu perjuangan yang berkembang berdasarkan identitas kedaerahan tanpa adanya koordinasi antardaerah. (Kartodirdjo 1973)(Ricklefs 2008).

Setelah kebangkrutan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1799, pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih pengelolaan wilayah Hindia Belanda dan mulai membangun sistem administrasi kolonial yang lebih terpusat. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui reorganisasi birokrasi, perluasan wilayah kekuasaan, peningkatan pemungutan pajak, monopoli perdagangan, serta intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal. Puncaknya, sejak diberlakukannya Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat pribumi semakin meningkat. Petani diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan tembakau untuk kepentingan pasar Eropa, sementara hasil pertanian pangan mengalami penurunan sehingga memicu kemiskinan dan kelaparan di berbagai daerah (Elson 1994)(Ricklefs 2008).

Menurut (Kartodirdjo 1990), tekanan ekonomi dan politik tersebut menjadi faktor utama munculnya berbagai gerakan protes sosial (social protest movements) di pedesaan Jawa maupun daerah lain. Kartodirdjo menjelaskan bahwa gerakan sosial pada masa kolonial merupakan respons kolektif masyarakat terhadap perubahan struktur sosial yang merugikan rakyat akibat dominasi kolonial. Perlawanan tersebut tidak semata-mata didorong oleh persoalan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh hilangnya legitimasi penguasa lokal, campur tangan Belanda terhadap adat dan agama, serta meningkatnya kesenjangan sosial antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi.

Karakteristik utama gerakan sosial pada fase ini adalah kepemimpinan yang masih bertumpu pada elite tradisional, seperti raja, bangsawan, ulama, dan pemimpin karismatik. Kepemimpinan tersebut memperoleh legitimasi dari hubungan genealogis, kewibawaan politik, maupun pengaruh keagamaan yang kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, loyalitas rakyat lebih banyak diberikan kepada pemimpin lokal dibandingkan kepada gagasan kebangsaan yang pada masa itu belum berkembang. (Reid 1974) menjelaskan bahwa identitas masyarakat Nusantara pada abad XIX masih didasarkan pada kesetiaan terhadap kerajaan, etnis, dan komunitas agama, sehingga konsep Indonesia sebagai identitas politik bersama belum terbentuk.



Selain bersifat lokal, gerakan sosial pada abad XIX juga memiliki dimensi religius yang kuat. Dalam banyak kasus, agama menjadi sumber legitimasi perjuangan sekaligus alat mobilisasi masyarakat. Perang Padri di Sumatera Barat, misalnya, pada awalnya merupakan konflik internal antara kelompok adat dan kelompok ulama sebelum berkembang menjadi perlawanan terhadap Belanda. Demikian pula Perang Diponegoro dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap konsep Ratu Adil, sedangkan Perang Aceh berkembang sebagai perjuangan mempertahankan agama Islam melalui semangat jihad. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan menjadi unsur penting dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat resistensi terhadap kolonialisme (Carey 2011)(Reid 1974).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa gerakan sosial penting yang mewakili fase perlawanan tradisional pada abad XIX, yaitu Perang Padri (1803–1838), Perang Diponegoro (1825–1830), Perang Banjar (1859–1863), dan Perang Aceh (1873–1904). Keempat perlawanan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, namun memperlihatkan pola yang relatif sama, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap intervensi politik Belanda, eksploitasi ekonomi, serta ancaman terhadap sistem sosial dan budaya masyarakat setempat.

Perang Padri di Sumatera Barat berkembang dari konflik antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan kaum adat, sebelum akhirnya berubah menjadi perang melawan Belanda setelah pemerintah kolonial ikut campur dalam konflik tersebut. Menurut (Dobbin and Sutton 1998), campur tangan Belanda justru memperluas skala konflik sehingga masyarakat Minangkabau bersatu menghadapi kekuatan kolonial. Perang ini menunjukkan bahwa kolonialisme sering memanfaatkan konflik internal masyarakat sebagai strategi politik *divide et impera*, tetapi pada saat yang sama memunculkan solidaritas baru dalam menghadapi penjajah.

Perang Diponegoro merupakan gerakan sosial terbesar di Pulau Jawa pada abad XIX. (Carey 2011) menjelaskan bahwa perang ini dipicu oleh akumulasi berbagai persoalan, antara lain intervensi Belanda dalam urusan Kesultanan Yogyakarta, kenaikan pajak, penyewaan tanah kepada pihak asing, serta pembangunan jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, di balik faktor-faktor tersebut terdapat ketidakpuasan yang lebih mendalam terhadap dominasi kolonial yang dianggap merusak tatanan politik, sosial, dan religius masyarakat Jawa. Perang Diponegoro melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, santri, bangsawan, hingga rakyat miskin, sehingga oleh (Kartodirdjo 1973) dipandang sebagai salah satu bentuk gerakan sosial terbesar dalam sejarah kolonial Indonesia.

Di Kalimantan Selatan, Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari sebagai bentuk penolakan terhadap campur tangan Belanda dalam urusan suksesi Kesultanan Banjar. Belanda berupaya mengendalikan pemerintahan lokal untuk menguasai sumber daya ekonomi, terutama perdagangan hasil hutan dan pertambangan. Intervensi tersebut memicu perlawanan masyarakat Banjar yang berlangsung selama beberapa tahun dan menunjukkan bahwa kepentingan politik serta ekonomi kolonial menjadi faktor utama lahirnya gerakan sosial di wilayah tersebut (Ricklefs 2008).

Sementara itu, Perang Aceh merupakan perlawanan terpanjang terhadap kolonialisme Belanda. (Reid 1974) menjelaskan bahwa perang ini memiliki karakteristik yang berbeda karena didukung oleh jaringan ulama yang sangat kuat. Semangat jihad menjadi dasar ideologis perjuangan rakyat Aceh sehingga mampu mempertahankan perlawanan selama lebih dari tiga dekade. Tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, dan Teungku Chik di Tiro berhasil membangun



solidaritas masyarakat melalui perpaduan antara kepemimpinan militer dan legitimasi keagamaan. Perang Aceh memperlihatkan bahwa kolonialisme Belanda menghadapi tantangan besar ketika gerakan sosial memperoleh dukungan luas dari masyarakat serta didasarkan pada identitas religius yang kuat.

Meskipun berbagai perlawanan tersebut menunjukkan keberanian dan semangat perjuangan rakyat, hasil penelitian mengindikasikan bahwa hampir seluruh gerakan bersenjata pada abad XIX mengalami kegagalan dalam mengusir Belanda. Beberapa faktor penyebabnya antara lain tidak adanya koordinasi antardaerah, keterbatasan persenjataan, lemahnya sistem komunikasi, serta penerapan politik divide et impera oleh pemerintah kolonial. Belanda juga memiliki keunggulan dalam bidang teknologi militer, organisasi birokrasi, dan sumber daya ekonomi yang memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan di berbagai wilayah Nusantara (Ricklefs 2008).

Namun demikian, kegagalan secara militer tidak berarti bahwa gerakan-gerakan tersebut tidak memiliki arti penting dalam sejarah Indonesia. Sebaliknya, perlawanan tradisional menjadi fondasi bagi munculnya kesadaran kolektif untuk menentang kolonialisme. Pengalaman perjuangan lokal memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya untuk mengembangkan bentuk perjuangan yang lebih terorganisasi melalui pendidikan, organisasi modern, dan gerakan nasional pada awal abad XX. Dengan demikian, fase perlawanan tradisional merupakan tahap awal dalam evolusi gerakan sosial rakyat Indonesia menuju terbentuknya nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan

Fase Transisi (1901–1911): Pengaruh Politik Etis dan Munculnya Kelompok Intelektual Pribumi

Periode 1901–1911 merupakan fase transisi yang sangat penting dalam perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia. Pada periode ini terjadi perubahan orientasi perjuangan dari perlawanan bersenjata yang bersifat lokal menuju gerakan sosial modern yang lebih terorganisasi, rasional, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Transformasi tersebut tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perubahan kebijakan kolonial Belanda, berkembangnya pendidikan Barat, meningkatnya mobilitas sosial masyarakat pribumi, serta munculnya kelompok intelektual yang mulai memperkenalkan gagasan nasionalisme. Dalam historiografi Indonesia, periode ini sering dipandang sebagai jembatan antara era perlawanan tradisional abad XIX dan era kebangkitan nasional pada awal abad XX (Fauzi and Widyanti 2023) (Ricklefs 2008).

Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan tersebut adalah diberlakukannya Politik Etis (Ethical Policy) oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap kritik yang berkembang di Belanda mengenai praktik eksploitasi ekonomi selama penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) dan kebijakan liberal yang dianggap telah memperkaya negeri Belanda, tetapi meninggalkan kemiskinan yang luas di Hindia Belanda. Kritik tersebut dipopulerkan oleh Conrad Theodor van Deventer melalui artikelnya yang berjudul *Een Eereschuld* (A Debt of Honour atau "Utang Kehormatan") yang diterbitkan dalam majalah *De Gids* pada tahun 1899. Van Deventer berpendapat bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk membalas keuntungan yang telah diperoleh dari tanah jajahan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi (Van Deventer 1899) (Ricklefs 2008).



Sebagai implementasi dari gagasan tersebut, pemerintah kolonial memperkenalkan tiga program utama yang dikenal sebagai Trias van Deventer, yaitu edukasi (pendidikan), irigasi, dan emigrasi (transmigrasi). Dari ketiga program tersebut, bidang pendidikan memberikan dampak paling besar terhadap perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia. Pendidikan modern membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat pribumi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan administrasi, dan wawasan mengenai perkembangan politik dunia. Walaupun akses pendidikan masih sangat terbatas dan lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi kolonial, kebijakan ini justru menghasilkan kelompok elite intelektual yang kemudian menjadi pelopor gerakan nasional (Ricklefs 2008)(Vickers 2013).

Sejak awal abad XX pemerintah kolonial mulai memperluas jaringan pendidikan melalui berbagai lembaga seperti Europeesche Lagere School (ELS), Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Hoogere Burger School (HBS), Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), dan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA). Sekolah-sekolah tersebut melahirkan generasi baru kaum terdidik yang tidak lagi melihat kolonialisme sebagai sesuatu yang harus diterima, melainkan sebagai sistem yang dapat dikritik dan diubah melalui perjuangan politik serta organisasi modern. Menurut (Nagazumi 1972), pendidikan kolonial secara tidak langsung menciptakan kelompok elite pribumi yang memiliki kemampuan intelektual untuk mengorganisasi masyarakat dan merumuskan gagasan tentang kebangsaan Indonesia.

Perubahan sosial yang terjadi akibat berkembangnya pendidikan modern juga melahirkan kelas menengah pribumi yang terdiri atas guru, dokter, pegawai negeri, wartawan, pengacara, dan pedagang terdidik. Kelompok ini memiliki mobilitas sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pedesaan sehingga lebih mudah mengakses informasi mengenai perkembangan dunia internasional, demokrasi, liberalisme, nasionalisme, dan hak-hak politik. Menurut (Anderson 2020), berkembangnya komunitas terdidik tersebut menjadi fondasi munculnya "komunitas terbayang" (imagined community), yaitu kesadaran bahwa masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan daerah merupakan bagian dari satu bangsa yang memiliki kepentingan bersama.

Selain pendidikan formal, perkembangan media massa juga menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran nasional. Awal abad XX ditandai dengan meningkatnya jumlah surat kabar dan majalah yang diterbitkan oleh kaum pribumi maupun kelompok peranakan. Surat kabar seperti Medan Prijaji yang dipimpin oleh Tirta Adhi Soerjo menjadi media penting dalam menyebarkan gagasan mengenai persamaan hak, kritik terhadap kebijakan kolonial, serta pentingnya organisasi modern. Menurut (Adam 2018), pers pribumi pada awal abad XX berfungsi sebagai ruang publik yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dan mempercepat penyebaran ide-ide nasionalisme ke berbagai wilayah di Hindia Belanda.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada fase transisi ini terjadi perubahan dalam strategi perjuangan rakyat. Jika pada abad XIX perjuangan didominasi oleh perang fisik, maka pada periode 1901–1911 mulai berkembang perjuangan melalui pendidikan, diskusi ilmiah, organisasi sosial, dan aktivitas jurnalistik. Kaum intelektual mulai menyadari bahwa kekuatan kolonial Belanda tidak mungkin dikalahkan hanya dengan perlawanan bersenjata. Sebaliknya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan kesadaran kolektif, dan pembentukan organisasi dipandang sebagai strategi yang lebih efektif dalam jangka panjang. (Kartodirdjo 1992) menyebut



perubahan ini sebagai modernisasi gerakan sosial, yaitu pergeseran dari gerakan yang berbasis kharisma pemimpin menuju gerakan yang berbasis organisasi dan ideologi.

Periode transisi ini juga ditandai oleh meningkatnya interaksi antara kaum intelektual dari berbagai daerah. Mahasiswa dan pelajar yang belajar di Batavia, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, maupun kota-kota lain mulai membangun jaringan komunikasi lintas etnis. Interaksi tersebut memperluas wawasan mereka mengenai kondisi masyarakat di berbagai wilayah Nusantara sehingga perlahan-lahan muncul kesadaran bahwa penjajahan merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi secara kolektif. (Fauzi and Widyanti 2023), berkembangnya jaringan intelektual lintas daerah menjadi salah satu prasyarat utama bagi lahirnya nasionalisme Indonesia pada awal abad XX.

Dalam perspektif teori gerakan sosial, perubahan yang terjadi pada periode ini menunjukkan adanya transformasi sumber daya (resource mobilization). Jika pada masa sebelumnya kekuatan gerakan bertumpu pada kemampuan militer dan kharisma pemimpin lokal, maka pada fase transisi sumber daya utama gerakan berubah menjadi pendidikan, organisasi, media massa, jaringan komunikasi, dan kemampuan intelektual. Perubahan tersebut memungkinkan lahirnya bentuk perjuangan yang lebih sistematis, terencana, dan mampu menjangkau wilayah yang lebih luas (McAdam, McCarthy, and Zald 1996).

Puncak dari fase transisi ini adalah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang oleh banyak sejarawan dipandang sebagai awal Kebangkitan Nasional Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa STOVIA dengan dukungan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun pada awalnya lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat Jawa dan Madura, Budi Utomo menjadi simbol lahirnya organisasi modern yang menggunakan sistem kepengurusan, program kerja, dan administrasi yang terstruktur. Kehadiran organisasi ini menandai berakhirnya dominasi gerakan lokal dan membuka jalan bagi munculnya organisasi-organisasi nasional lain seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, dan Partai Nasional Indonesia pada dekade berikutnya (Nagazumi 1972)(Ricklefs 2008).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fase transisi (1901–1911) merupakan periode yang menentukan dalam sejarah gerakan sosial rakyat Indonesia. Politik Etis memang dirancang sebagai kebijakan kolonial untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan, tetapi secara tidak langsung menghasilkan kelompok intelektual pribumi yang menjadi motor penggerak kebangkitan nasional. Pendidikan, pers, organisasi modern, dan jaringan intelektual mengubah pola perjuangan dari perlawanan bersenjata menuju perjuangan politik dan sosial yang lebih terorganisasi. Transformasi inilah yang kemudian menjadi fondasi lahirnya gerakan nasional modern pada dekade berikutnya.

Fase Gerakan Nasional Modern (1908–1942): Lahirnya Organisasi Modern, Berkembangnya Pers Nasional, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat, dan Tumbuhnya Nasionalisme Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 1908–1942 merupakan fase paling penting dalam perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia karena pada masa ini terjadi transformasi gerakan dari perjuangan yang bersifat lokal menuju gerakan nasional modern yang memiliki organisasi, ideologi, kepemimpinan, serta tujuan politik yang lebih jelas. Jika pada abad XIX



gerakan sosial didominasi oleh perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme Belanda, maka sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, perjuangan mengalami perubahan mendasar melalui pemanfaatan organisasi modern, pendidikan, media massa, kegiatan sosial, dan aktivitas politik sebagai instrumen utama dalam memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia. Perubahan ini menandai lahirnya era Kebangkitan Nasional, yaitu periode ketika kesadaran sebagai satu bangsa mulai berkembang di kalangan masyarakat Hindia Belanda (Nagazumi 1972)

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain berkembangnya pendidikan Barat sebagai dampak Politik Etis, meningkatnya jumlah kaum intelektual pribumi, meluasnya jaringan komunikasi antardaerah, serta berkembangnya pemikiran nasionalisme, demokrasi, dan anti-kolonialisme yang berasal dari Eropa maupun Asia. Menurut (Anderson 2020), nasionalisme tidak lahir secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pembentukan "komunitas terbayang" (*imagined community*), yaitu munculnya kesadaran kolektif bahwa masyarakat dari berbagai suku, agama, dan wilayah merupakan bagian dari satu komunitas politik yang memiliki identitas dan tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, kesadaran tersebut tumbuh melalui pendidikan, organisasi modern, dan media massa yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu ruang komunikasi nasional.

Lahirnya Organisasi Modern sebagai Instrumen Perjuangan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Budi Utomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA), merupakan organisasi modern pertama yang menjadi tonggak Kebangkitan Nasional Indonesia. Organisasi ini lahir atas gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mendorong pentingnya peningkatan pendidikan bagi masyarakat pribumi, kemudian diwujudkan oleh mahasiswa STOVIA seperti Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan Soeradji. Berbeda dengan gerakan pada abad XIX yang bersifat spontan, Budi Utomo memiliki struktur organisasi yang jelas, kepengurusan tetap, program kerja, sistem keanggotaan, dan mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan (Nagazumi 1972)

Walaupun ruang geraknya pada awalnya masih terbatas pada masyarakat Jawa dan Madura serta lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan dan kebudayaan, Budi Utomo berhasil memperkenalkan pola perjuangan baru yang berbasis organisasi. Menurut (Ricklefs 2008), arti penting Budi Utomo bukan terletak pada kekuatan politiknya, tetapi pada keberhasilannya memperkenalkan bentuk perjuangan modern yang mengedepankan pendidikan, persatuan, dan kesadaran kebangsaan.

Perkembangan gerakan nasional semakin pesat setelah berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912 di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi dan berkembang pesat di bawah H.O.S. Tjokroaminoto. Berbeda dengan Budi Utomo yang anggotanya didominasi kaum terpelajar, Sarekat Islam berhasil menghimpun pedagang, petani, buruh, ulama, dan masyarakat perkotaan sehingga menjadi organisasi massa terbesar pada awal abad XX. Sarekat Islam mengubah wajah gerakan sosial Indonesia dari organisasi elite menjadi gerakan rakyat yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Organisasi ini tidak hanya memperjuangkan kepentingan ekonomi pedagang pribumi, tetapi juga menyuarkan keadilan sosial, persamaan hak, dan kritik terhadap diskriminasi kolonial.



Pada tahun yang sama berdiri pula Indische Partij, yang dipelopori oleh E.F.E. Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Organisasi ini merupakan partai politik pertama yang secara terbuka menyuarakan cita-cita kemerdekaan Hindia Belanda tanpa membedakan asal-usul ras maupun etnis. Gagasan nasionalisme yang dikembangkan Indische Partij jauh lebih progresif dibandingkan organisasi-organisasi sebelumnya karena menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan utama perjuangan. Akibat sikap politik yang dianggap mengancam pemerintah kolonial, ketiga tokohnya kemudian diasingkan ke Belanda pada tahun 1913

Selain organisasi politik, perkembangan gerakan nasional juga ditandai oleh berdirinya organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah (1912) yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama (1926) yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Kedua organisasi tersebut memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, serta memperkuat identitas masyarakat Islam di Indonesia. Menurut (Noer 1982), organisasi-organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam membangun masyarakat sipil (civil society) yang menjadi basis bagi berkembangnya nasionalisme Indonesia.

Berkembangnya Pers Nasional sebagai Media Gerakan Sosial

Perkembangan pers nasional merupakan salah satu faktor yang mempercepat transformasi gerakan sosial rakyat Indonesia. Pada awal abad XX, surat kabar menjadi media utama dalam menyebarkan gagasan nasionalisme, demokrasi, persamaan hak, dan kritik terhadap kebijakan kolonial. Kehadiran media massa memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antardaerah sehingga memperkuat komunikasi politik di kalangan masyarakat pribumi.

Salah satu tokoh penting dalam perkembangan pers nasional adalah Tirta Adhi Soerjo, yang mendirikan surat kabar Medan Prijaji pada tahun 1907. Surat kabar ini dikenal sebagai media pertama yang secara konsisten membela kepentingan masyarakat pribumi dan mengkritik ketidakadilan kolonial. (Adam 2018) menjelaskan bahwa pers pribumi telah membentuk ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat mendiskusikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik secara terbuka. Melalui media massa, gagasan mengenai persatuan Indonesia menyebar lebih cepat ke berbagai wilayah Nusantara.

Selain Medan Prijaji, berbagai surat kabar seperti Oetoesan Hindia, Sinar Hindia, De Expres, Pewarta Deli, dan Soera Oemoem menjadi sarana penting bagi organisasi-organisasi pergerakan dalam menyampaikan ide-ide nasionalisme. Menurut (Anderson 2006), perkembangan media cetak berkontribusi besar dalam membangun kesadaran nasional karena memungkinkan masyarakat yang tidak saling mengenal merasa menjadi bagian dari komunitas yang sama.

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Nasional

Salah satu ciri utama gerakan nasional modern adalah semakin luasnya partisipasi masyarakat. Jika pada abad XIX perlawanan hanya dipimpin oleh elite tradisional, maka pada periode 1908–1942 hampir seluruh lapisan masyarakat mulai terlibat dalam gerakan nasional.

Kaum pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok intelektual yang mengembangkan organisasi kepemudaan seperti Tri Koro Dharmo (1915), Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, dan berbagai organisasi kedaerahan lainnya. Interaksi antarpemuda dari berbagai daerah melahirkan kesadaran bahwa perbedaan suku, bahasa, dan budaya tidak menghalangi mereka untuk



bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kesadaran tersebut mencapai puncaknya dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda sebagai tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia (Ricklefs 2008)

Kaum buruh juga mulai membentuk organisasi seperti Personeel Fabriek Bond, VSTP (Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel), dan berbagai serikat pekerja lainnya yang memperjuangkan hak-hak ekonomi sekaligus menyuarakan kritik terhadap sistem kolonial. keterlibatan buruh menunjukkan bahwa gerakan nasional tidak lagi terbatas pada elite intelektual, tetapi telah berkembang menjadi gerakan massa yang memiliki basis sosial yang luas.

Partisipasi perempuan juga mengalami perkembangan yang signifikan. Organisasi seperti Putri Mardika (1912), Aisyiyah (1917), dan berbagai perkumpulan perempuan lainnya berperan dalam memperjuangkan pendidikan perempuan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peran perempuan dalam kehidupan publik. (Blackburn 2004) menjelaskan bahwa gerakan perempuan Indonesia pada masa kolonial menjadi bagian integral dari perjuangan nasional karena memperluas basis sosial gerakan kemerdekaan.

Tumbuhnya Nasionalisme Indonesia

Perkembangan organisasi modern, pers nasional, pendidikan, dan partisipasi masyarakat secara bertahap melahirkan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme pada periode ini tidak lagi didasarkan pada loyalitas terhadap kerajaan, etnis, atau agama tertentu, melainkan pada kesadaran bahwa seluruh masyarakat Nusantara merupakan satu bangsa yang memiliki kepentingan bersama untuk memperoleh kemerdekaan.

Nasionalisme Indonesia berkembang melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman kolektif menghadapi kolonialisme. Persamaan nasib sebagai bangsa terjajah menjadi perekat utama yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan nasional.

Pada dekade 1930-an hingga awal 1940-an, gerakan nasional semakin matang melalui perjuangan partai-partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partindo, Gerindo, dan Parindra. Meskipun pemerintah kolonial melakukan berbagai tindakan represif seperti penangkapan, pembubaran organisasi, sensor pers, dan pembuangan tokoh-tokoh nasionalis ke Digul, Banda Neira, maupun Ende, semangat nasionalisme tetap berkembang di kalangan masyarakat. Menurut (Ricklefs 1993), tindakan represif tersebut justru memperkuat solidaritas nasional dan mempertegas tuntutan akan kemerdekaan.

Fase gerakan nasional modern (1908–1942) menunjukkan adanya transformasi fundamental dalam karakter gerakan sosial rakyat Indonesia. Perjuangan tidak lagi bergantung pada kekuatan militer atau kepemimpinan tradisional, tetapi beralih pada organisasi modern, pendidikan, media massa, jaringan intelektual, dan mobilisasi massa. Transformasi ini memperluas partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok sosial, termasuk pelajar, buruh, perempuan, pedagang, ulama, dan kaum profesional. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia lahir sebagai hasil interaksi antara perubahan sosial akibat kolonialisme, berkembangnya pendidikan modern, munculnya elite intelektual, serta kemampuan organisasi-organisasi nasional dalam mengonsolidasikan berbagai kekuatan sosial menjadi gerakan kolektif yang memperjuangkan kemerdekaan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda pada abad XIX–XX mengalami transformasi yang signifikan dari perlawanan bersenjata yang bersifat lokal menuju gerakan nasional modern yang terorganisasi. Pada fase perlawanan tradisional (1800–1900), gerakan dipimpin oleh raja, bangsawan, dan ulama sebagai respons terhadap eksploitasi ekonomi, intervensi politik, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai adat dan agama. Meskipun sebagian besar perlawanan berhasil dipadamkan oleh pemerintah kolonial, gerakan tersebut menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya semangat anti-kolonialisme

Pada fase transisi (1901–1911), penerapan Politik Etis mendorong berkembangnya pendidikan modern yang melahirkan kelompok intelektual pribumi. Kehadiran kaum terpelajar, media massa, dan meningkatnya kesadaran politik mengubah pola perjuangan dari perlawanan fisik menuju perjuangan melalui organisasi, pendidikan, dan pers

Selanjutnya, pada fase gerakan nasional modern (1908–1942), lahirnya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan Partai Nasional Indonesia memperkuat gerakan sosial rakyat melalui organisasi yang terstruktur, pers nasional, serta partisipasi masyarakat yang semakin luas. Puncaknya, Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting dalam memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa Indonesia

Dengan demikian, perkembangan gerakan sosial rakyat Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme merupakan proses historis yang bertahap, dari perlawanan lokal menuju gerakan nasional yang terorganisasi. Transformasi tersebut menjadi fondasi utama bagi lahirnya nasionalisme Indonesia dan perjuangan menuju kemerdekaan pada tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Ahmat. 2018. *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness*. Cornell University Press.
- Amsi, Najirah. 2026. “BAB 7 PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENELITIAN SEJARAH.” *Pengantar Ilmu Sejarah: Bagi Pendidikan Sejarah* 141.
- Anderson, Benedict. 2006. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Equinox Publishing.
- Anderson, Benedict. 2020. “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.” Pp. 282–88 in *The new social theory reader*. Routledge.
- Arifin, Faizal. 2023. *Metode Sejarah: Merencanakan Dan Menulis Penelitian Sejarah*. Deepublish.
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Carey, Peter. 2011. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro Dan Akhir Tatanan Lama Di Jawa, 1785-1855*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Van Deventer, C. Th. 1899. *Eene Eereschuld*. Vol. 1.
- Dobbin, Frank, and John R. Sutton. 1998. “The Strength of a Weak State: The Rights Revolution and the Rise of Human Resources Management Divisions.” *American Journal of Sociology* 104(2):441–76.
- Elson, Robert Edward. 1994. *Village Java under the Cultivation System, 1830-1870*. Asian Studies



Association of Australia Sydney.

- Fauzi, Irfan Ahmad, and Rahayu Hardita Dwi Widyanti. 2023. "KH Yusuf Tauziri: Kyai Nasionalis Dari Cipari Tahun 1934-1953." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 11(2):249–62.
- Gottschalk, Louis. 1986. "Mengerti Sejarah, Terj." Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jahan, Muhammad Tristan Shah. 2024. "Zaman Radikal: Dinamika Gerakan Sosial Di Indonesia Pada Masa Kolonialisme 1912-1926." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 20(1).
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. "Protest Movements in Rural Java."
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. "Jolkanlah Kerangka Struktural Yang Mencakup Pelbagai Perubahan Hubungan Dan Interaksi Sosial Beserta Transformasi Struktural Yang." *Prospek Pedesaan* 15.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. "Pengantar Sejarah Indonesia Baru." (No Title).
- Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah. 2013. "Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: PT." Tiara Wacana.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald. 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge University Press.
- Muzakir, Ali. 2024. "Di Tengah Revolusi Kemerdekaan: Restorasi Kesultanan Jambi Dan Persatuan Negara Republik Indonesia." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 30(2):194–205.
- Nagazumi, Akira. 1972. *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908-1918*. Vol. 10. Institute of Developing Economies.
- Noer, Deliar. 1982. "Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942, Jakarta: PT." Pustaka LP3ES Indonesia.
- Reid, Anthony. 1974. "The Indonesian National Revolution, 1945-1950." (No Title).
- Ricklefs, Merle Calvin. 1993. *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. MacMillan London.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.
- Rosmaida, Rosmaida Sinaga, Alfiana Nurul Fadillah Alfiana, Azrina Hendri Azrina Hendri, Muhammad Ray Jhon Jhon, and Mutiara Nazla Dalimunthe Mutiara. 2025. "Dari Tanam Paksa Ke Politik Etis: Dinamika Kebijakan Kolonial Belanda Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Pribumi." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(04):300–313.
- Vickers, Adrian. 2013. *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.